

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perubahan Nilai IPH di Kabupaten Langkat

Adapun nilai IPH di Kabupaten Langkat dapat dilihat melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Bulan April sampai dengan Juni (Triwulan II) Tahun 2025, sebagai berikut :

a. Bulan April 2025

Pada Minggu I hingga Minggu IV Januari 2025 Kabupaten Langkat mengalami Inflasi. Tercatat akhir Minggu IV nilai IPH di Kabupaten Langkat mengalami Inflasi sebesar 2,21% dengan komoditas yang memberikan andil deflasi terbesar diantaranya Cabai Merah, Bawang Merah, dan Beras

b. Bulan Mei 2025

Pada Minggu I sampai dengan Minggu V Mei 2025 IPH Kabupaten Langkat mengalami Deflasi untuk setiap minggunya. Dengan Deflasi IPH pada Minggu I sebesar -1,11% dan hingga Minggu V perubahan IPH menjadi -2,47%. Hal ini menunjukkan Penurunan harga barang dan jasa pada minggu pertama sampai dengan Minggu Kelima, sehingga Deflasi terus mengalami Perubahan. Dengan komoditas yang memberikan andil perubahan yakni Cabai Merah, Jeruk, dan Bawang Merah

c. Bulan Juni 2025

Pada Minggu I Kabupaten Langkat menunjukan perubahan IPH sebesar -1,11%. Sedangkan IPH Minggu ke IV sebesar -1,34. Komoditas yang memberikan andil perubahan harga yakni Cabai Merah, Bawang Merah, dan Bawang Putih

| BULAN | MINGGU ke- | IPH (%) | KOMODITAS PENYUMBANG IPH |
|--------------|-------------------|----------------|---|
| April | 1 | - | Libur |
| | 2 | 2,51 | Cabai Merah, Bawang Merah, Beras |
| | 3 | 3,48 | Cabai Merah, Bawang Merah, Beras |
| | 4 | 2,21 | Cabai Merah, Bawang Merah, Beras |
| Mei | 1 | -1,11 | Cabai Merah, Daging Sapi, Cabai Rawit |
| | 2 | - | - |
| | 3 | -1,93 | Cabai Merah, Jeruk, Daging Sapi |
| | 4 | -2.27 | Cabai Merah, Jeruk, Bawang Merah |
| | 5 | -2,47 | Cabai Merah, Jeruk, Bawang Merah |
| Juni | 1 | -1,18 | Cabai Merah, Bawang Merah, Bawang Putih |
| | 2 | -0,79 | Cabai Merah, Bawang Merah, Bawang Putih |
| | 3 | -0.98 | Cabai Merah, Bawang Merah, Bawang Putih |
| | 4 | -1,34 | Cabai Merah, Bawang Merah, Bawang Putih |

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Langkat pada Triwulan II Tahun 2025 antara lain:

1. Keterbatasan Infrastruktur Distribusi

Masalah: Infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan yang rusak dan terbatasnya sarana transportasi, menghambat distribusi barang dan jasa di Kabupaten Langkat.

Dampak: Ketidakstabilan pasokan barang di pasar menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan, khususnya untuk barang-barang kebutuhan pokok.

2. Ketergantungan pada Pasokan dari Luar Daerah

Masalah: Kabupaten Langkat masih sangat bergantung pada pasokan barang dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan lokal. (komoditas apa saja yang masih bergantung pada stok dari luar daerah)

Dampak: Ketergantungan ini membuat harga di Kabupaten Langkat rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan dari daerah pemasok.

3. Variabilitas Produksi Pertanian

Masalah: Produksi padi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan faktor musiman.

Dampak: Ketidakstabilan produksi menyebabkan fluktuasi harga komoditas pertanian, yang berdampak langsung pada IPH.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Adapun kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan dalam meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengimplementasikan strategi 4K yang disepakati yaitu, :

1. KETERJANGKAUAN HARGA :

Dalam memastikan harga komoditas tetap stabil agar terjangkau masyarakat, maka upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan sidak pasar bahan pokok penting bertempat di Pasar Tradisional Stabat Baru Kecamatan Babalan, Stabat dan Kuala.
2. Melakukan monitoring harga dan ketersediaan bahan pokok penting menjelang Hari

Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri bertempat di Pasar Tradisional Stabat Baru Kecamatan Stabat.

3. Melaksanakan pembinaan dan monitoring untuk mengecek ketersediaan, pendistribusian serta HET Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU dan Gas LPG Tabung 3 Kilogram di pangkalan wilayah kerja Kabupaten Langkat.
4. Tersedianya Pasar Tani (Pasar Pекanan) di 18 Kecamatan Kabupaten Langkat dengan jumlah pedagang sebanyak 906.

2. KETERSEDIAAN PASOKAN :

Sebagai upaya dalam menjaga ketersediaan pasokan komoditas di pasar, pemerintah Kabupaten Langkat telah melakukan beberapa langkah terkait, antara lain:

1. Tim KP3 Kabupaten Langkat melakukan peninjauan penyaluran pupuk bersubsidi bertempat di Kios - Kios Pupuk Kabupaten Langkat.
2. Monitoring stok beras bertempat di Gudang Bulog Stabat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Adha.
3. Gerakan Panen Raya Padi dilaksanakan di Desa Puworbinangun Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat.
4. Kegiatan Panen Raya Jagung dilaksanakan di Lahan Yayasan Bhayangkara Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
5. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bank Indonesia KPw Sumatera Utara, Dinas Terkait dan Stakeholdes membahas perkembangan Komoditas Padi dari petani Lokal anggota Gapoktan dan Sekitarnya yang akan dikerjasamakan dengan Koperasi Unit Desa (KUD) HARTA dan akan di buat Merek baru dari Bank Indonesia, dalam skema kerjasama kemitraan distribusi

3. KELANCARAN DISTRIBUSI :

Sebagai upaya untuk mendukung Pengendalian Inflasi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Langkat mengambil kebijakan:

1. Bantuan transportasi darat (Bus) kepada masyarakat umum secara gratis dengan rute Mesjid Raya Kota Stabat menuju Stasisun Kereta Api Kwala Bingai (Pulang Pergi).
2. Bantuan transportasi air (Speed Boat) dengan rute Dermaga Tanjung Ibus Secanggang menuju Dermaga Jaring Halus Secanggang yang diperuntukan untuk ASN, Guru Honorer dan Tenaga Kesehatan secara gratis.
3. Mendorong penjualan komoditas melalui pemanfaatan e-Pasar Kabupaten Langkat.

4. KOMUNIKASI EFEKTIF :

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pengendalian Inflasi, maka diperlakukan berbagai upaya komunikasi melalui Rapat-Rapat Teknis, diantaranya:

1. Rapat Koordinasi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 bersama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual (Zoom Meeting) yang

dipimpin langsung oleh Bapak SYAH AFANDIN, SH selaku Bupati Langkat, Ibu Tiorita Br Surbakti, SH selaku Wakil Bupati Langkat dan Bapak H. Amril, S.Sos, M.Ap selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat dan juga turut dihadiri dari unsur TNI/Polri, Bulog, BPS Langkat serta Kepala OPD di jajaran Pemkab Langkat lainnya bertempat di Ruang Langkat Command Center (LCC).

2. Rapat Koordinasi Tim Pembinaan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Langkat yang dipimpin langsung oleh Bapak Amril, S.Sos, M.AP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat dan dihadiri dari unsur TNI/Polri, Kejaksaan Negeri Stabat serta instansi terkait lainnya.
3. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Klaster Padi dan Jagung antara BRI Cabang Binjai, BULOG dan Gapoktan Maju Bersama.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan terkait upaya pengendalian inflasi di daerah, maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Langkat mengevaluasi beberapa kebijakan, yaitu :

1. Pemantauan stok dan kualitas pangan agar dilakukan secara intensif oleh TPID bersama Satgas Pangan termasuk melaksanakan sidak ke beberapa pasar tradisional bersama dengan Forkopimda di Kabupaten Langkat.
2. Meningkatkan kembali kegiatan Gerakan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah sebagai langkah untuk menjaga keterjangkauan harga pangan secara berkelanjutan sebagai antisipasi kenaikan harga barang pokok penting sehingga stabilitas inflasi daerah dapat terjaga.
3. Mendorong implementasi Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang sudah ada dan memperluas kerja sama dengan daerah lainnya.
4. Menggiatkan *Business Matching* antara produsen dan distributor bersama dengan pihak ketiga seperti BUMD, koperasi, kelompok tani, dan nelayan dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan, perluasan jaringan pemasaran dan akuntabilitas penyaluran bantuan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah produksi pangan.
5. Melakukan upaya pengawasan oleh tim pengendalian inflasi daerah (TPID) untuk memastikan pelaku usaha tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan menimbun barang dalam rangka spekulasi.
6. Meningkatkan efisiensi produksi pangan melalui sistem budidaya guna menjaga ketersediaan bahan pangan, pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dalam jual/beli barang, dan pembangunan sarana infrastruktur yang baik untuk kelancaran distribusi pangan.
7. Membangun sinergi yang baik dalam bekerjasama antara Dinas/Instansi terkait yang tergabung dalam TPID dengan menjaga kualitas data dalam menyajikan informasi atau penyampaian laporan yang valid terkait harga kebutuhan pokok penting dan ketersediaan barang.
8. Menciptakan inovasi kebijakan dengan mensinkronisasikan program kerja pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pengendalian inflasi dalam menjaga daya beli masyarakat demi stabilitas keterjangkauan harga.
9. diterapkan terintegrasi pada komoditas beras dengan program unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PI-KEKDA) serta dukungan pemerintah daerah dengan melibatkan kelompok tani, agregator/*offtaker* dan TPID Kabupaten Langkat.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengendalian inflasi maka Pemerintah Kabupaten Langkat merekomendasikan beberapa kebijakan pengendalian inflasi sebagai berikut :

1. Intensifikasi operasi pasar murah/ Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Bank Indonesia, TNI, POLRI, BULOG, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan pihak lainnya untuk komoditas bahan pokok penting terutama Cabai Merah, Bawang Merah, Minyak Goreng dan Beras disertai dengan upaya menambah pasokan dari daerah lain yang memiliki tingkat harga yang lebih rendah.
2. Memperkuat pemantauan kondisi pasokan dan harga bahan pangan di tingkat pedagang dan distributor dengan melakukan koordinasi dengan distributor untuk memperoleh informasi kondisi pasokan terkini dan harga ke depan sebagai upaya antisipasi pengendalian inflasi.
3. Terus memperkuat koordinasi antar Stakeholders yaitu Bank Indonesia, TNI, Polri, Kejaksaan, BULOG, PT. PLN Persero, Pertamina, Badan Pusat Statistik (BPS), Pupuk Indonesia, Supplier dan Distributor komoditas bahan pokok terkait untuk melakukan intervensi terhadap komoditas penyumbang utama inflasi dalam perubahan/kenaikan IPH sebagai upaya dalam menstabilkan harga komoditi tersebut.
4. Meningkatkan pengawasan distribusi Pupuk Bersubsidi melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).
5. Monitoring dan pengawasan distribusi LPG 3Kg Bersubsidi, dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di setiap SPBU dan distributor untuk mencegah penimbunan dan penyalahgunaan distribusi BBM.
6. Mendorong peningkatan efisiensi biaya logistik, interkoneksi antar Daerah ataupun Provinsi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan membangun sarana infrastruktur yang baik sehingga dapat mendorong kelancaran distribusi/penjualan barang.
7. Melaksanakan gerakan menanam dengan menanam komoditas hortikultura seperti cabai di pekarangan rumah, sekolah maupun pondok pesantren untuk menjaga ketersediaan komoditas dan ketahanan
8. Melakukan sidak pasar, monitoring dan pengawasan terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok penting secara intensif bersama Forkopimda, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan Kabupaten Langkat.
9. Penyediaan Informasi Harga dan ketersediaan/stok komoditas secara *real time*.
10. Optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten/Kota lainnya penghasil komoditas